

Strategi Eksistensi Potensi Lokal Masyarakat Adat Kampung Pitu di Tengah Akselerasi Percepatan PSN Kawasan Geopark Pegunungan Sewu Gunung Kidul

Shubuha Pilar Naredia, S.Sos., M.Si.,

Universitas Sebelas Maret, Shubuhapilar@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait strategi eksistensi potensi lokal masyarakat adat Kampung Pitu di Kabupaten Gunungkidul yang berada di tengah masifnya akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan Kawasan Geopark Pegunungan Sewu. Kampung Pitu yang memiliki adat unik yaitu masih mempertahankan tradisi khas mereka dengan hanya dihuni oleh tujuh keluarga ini menghadapi tantangan modernisasi dan komersialisasi ruang hidup mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrinsik. Data dikumpulkan melalui depth-interview, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Melalui teori sosiologi Pierre Bourdieu, penelitian ini mengupas bagaimana kebiasaan masyarakat (habitus), aset yang dimiliki (modal), dan lingkungan persaingan (ranah) saling memengaruhi dalam upaya menjaga keberadaan adat mereka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya Kampung Pitu sebagai kampung adat mengalami dilema atas akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, berdasarkan teori praktik pemikiran Bourdieu masyarakat Kampung Pitu dengan akumulasi habitus dan modal yang terjadi dalam ranah maka menerapkan dua strategi eksistensi, yaitu Strategi Defensif-Ortodoksi yang dimanifestasikan dengan penegakan hukum adat yang kaku dan Strategi Adaptif-Heterodoksi yang diwujudkan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan peran aktif generasi muda.

Kata kunci: Geopark Pegunungan Sewu, Kampung Pitu, Masyarakat adat, Pierre Bourdieu, Potensi lokal, Proyek strategis nasional, Strategi eksistensi

1. PENDAHULUAN

Provinsi Yogyakarta termasuk di dalamnya yaitu Kabupaten Gunung Kidul mendukung percepatan Pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pendayagunaan potensi yang dimiliki, salah satunya di Geopark Pegunungan Sewu yang di dalamnya terdapat Komunitas Pitu. Berdasarkan skema praktik Bourdieu, aturan "tujuh KK" tersebut merupakan produk praksis budaya yang dibentuk oleh habitus para aktornya. Sistem sosial yang solid mengatur pola produksi, konsumsi, dan penggunaan pangan sebagai simbol keselarasan dengan alam serta leluhur (Beta Desi Pratiwi; V. Indah Sri Pinasti, 2016). Fenomena ini menunjukkan adanya tegangan spasial dan kultural antara tuntutan global dan keteguhan tradisi lokal. Komunitas pitu ini memegang teguh keyakinan bahwa wilayahnya hanya boleh dihuni oleh tujuh kepala keluarga (Purwana et al., 2019). Keberadaan Kampung

Pitu merupakan bentuk nyata dari integrasi kearifan lokal yang mendukung percepatan PSN pada sektor pariwisata dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan ini berpedoman pada landasan hukum yang kuat. Pada tingkat pusat, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang menetapkan status PSN dan penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (Perpres RI No 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 2020). Pada tingkat regional, diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menegaskan bahwa Nglanggeran merupakan bagian dari Kawasan Strategis Karst Gunungsewu dan wajib dilindungi serta dikembangkan secara berkelanjutan (Perda Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, 2019). Kebijakan tersebut kemudian diterapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang mengintegrasikan pelestarian budaya Kampung Pitu dengan tata kelola destinasi wisata berbasis geologi guna memastikan sinkronisasi antara perlindungan entitas lokal dan target pembangunan nasional (Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, 2011).

Pierre Bourdieu menawarkan sebuah pisau analisis yang tajam melalui triad konsep yaitu: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik (Mangihut, 2016a). Pendekatan sosiologi Pierre Bourdieu digunakan menganalisis eksistensi potensi lokal masyarakat adat Kampung Pitu di tengah masifnya akselerasi PSN Geopark Gunung Sewu karena mampu membedah relasi kuasa yang terjadi. Melalui konsep habitus, dapat dilihat bagaimana sistem disposisi mental serta nilai-nilai tradisi masyarakat Kampung Pitu bertahan dan beradaptasi ketika berhadapan dengan logika pembangunan negara. Arena (*field*) pariwisata Gunungkidul menjadi ruang kontestasi di mana modal budaya berupa pengetahuan lokal dan modal simbolik berupa status masyarakat adat dipertaruhkan demi memperoleh posisi tawar yang kuat. Dengan menggunakan teori Bourdieu, dimungkinkan pengungkapan bagaimana masyarakat adat mampu mengelola aset internal mereka sebagai strategi dalam bertahan untuk memastikan identitas lokal mereka tidak tergerus oleh standarisasi global pengembangan geopark.

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah bagaimana habitus masyarakat adat Kampung Pitu bertransformasi ketika ruang hidup mereka diintegrasikan ke dalam konversi ekonomi wisata berbasis PSN, bagaimana bentuk konversi dan kontestasi modal yang terjadi antara agen lokal (Warga Kampung Pitu), Pemerintah Daerah, dan investor dalam ranah (*field*) pariwisata Geopark Gunungkidul. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa pelestarian potensi lokal berbasis adat di Kampung Pitu dapat menjadi bentuk resistensi simbolik sekaligus strategi adaptasi di tengah kuatnya arus komersialisasi ruang akibat kebijakan PSN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik untuk memahami secara mendalam fenomena unik masyarakat adat Kampung Pitu.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu: wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pemangku adat (Abdi Dalem, Sesepuh, Ketua RT Kampung Pitu), perwakilan pemerintah daerah (Pengelola Geopark/Dinas Pariwisata), dan masyarakat lokal; observasi partisipatif terhadap aktivitas sehari-hari serta pelaksanaan ritual adat; serta dokumentasi berupa regulasi tata ruang PSN dan arsip sejarah kampung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Abdullah, 2015). Interpretasi sosiologis terhadap fenomena ini dilakukan secara ketat dengan mengoperasionalkan konsep-konsep sosiologi Pierre Bourdieu, khususnya habitus, modal (capital), dan ranah (field), untuk membedah relasi kuasa serta strategi yang digunakan aktor di lapangan (Bourdieu, 1984).

3. ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi reflektif Pierre Bourdieu untuk membedah kompleksitas strategi yang digunakan Kampung Pitu untuk bertahan di tengah arus PSN Geopark Pegunungan Sewu. Sebagaimana dijelaskan oleh Harker et al., (2009), tindakan manusia di lapangan merupakan hasil dialektika antara disposisi internal (habitus) dan sumber daya yang dimiliki (modal) dalam arena kompetisi (ranah). Pierre Bourdieu merumuskan bahwa praktik sosial merupakan hasil perkalian antara habitus dan modal di dalam sebuah ranah tertentu (Bourdieu, 1984).

3.1. Habitus Masyarakat Adat Kampung Pitu

Habitus merupakan struktur kognitif yang digunakan oleh aktor untuk menghadapi permasalahan kehidupan sosial, yang diinternalisasi melalui sosialisasi jangka Panjang (Ritzer & Stepnisky, 2019). Habitus masyarakat Kampung Pitu dikonstruksi oleh kosmologi Jawa-Kejawen dan kepatuhan terhadap amanah yang dipercayakan oleh leluhur (*pundhen*). Nilai utama yang diyakini seperti "*nrimo ing pandum*" (menerima segala ketentuan dengan ikhlas) dan pembatasan 7 KK saja dipahami sebagai bentuk kontrol ekologis dan spiritual untuk menjaga harmoni alam (Sekarsih, 2021). Ketika PSN masuk membawa habitus modernitas, benturan internal menjadi keniscayaan karena adanya persinggungan antara logika efisiensi pembangunan dengan logika kelestarian adat. Meskipun begitu, habitus Kampung Pitu terbukti elastis dan fleksibel; mereka tidak menolak pembangunan, tetapi mengadopsi sikap adaptif-selektif. Elastisitas ini sejalan dengan pemikiran bahwa habitus bukanlah struktur kaku yang deterministik, melainkan memiliki kapasitas untuk berimprovisasi dalam merespons perubahan eksternal tanpa kehilangan esensi jati dirinya (Bourdieu, 1990).

Masyarakat Kampung Pitu menyaring kehadiran teknologi dan wisatawan asing menggunakan lensa "kepatuhan adat", di mana mereka membentuk habitus baru yang terbuka dengan adanya pariwisata namun secara spiritual tetap sakral. Fenomena ini merupakan bentuk "modernitas alternatif", di mana masyarakat lokal melakukan negosiasi aktif terhadap narasi global pembangunan demi mempertahankan kedaulatan ruang hidup mereka (Appadurai, 1996). Dengan demikian, strategi eksistensi masyarakat Kampung Pitu tidak

hanya bersifat defensif, tetapi juga merupakan transformasi cerdas yang menempatkan tradisi sebagai instrumen penyaring bagi derasny arus akselerasi kawasan Geopark.

Gambar 1. *Suasana Pemukiman Kampung Pitu*



Sumber: Naredia, 2026

3.2. Struktur Modal (Kapital) dalam Arena Kontestasi

Bourdieu membagi modal menjadi empat tipe, yaitu: modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik (Haryatmoko, 2016). Berikut merupakan pemetaan kepemilikan modal dan bentuk konversinya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pitu untuk menghadapi tekanan PSN:

3.2.1. Modal Budaya

Kondisi eksisting di Kampung Pitu mencakup tatanan nilai yang unik, mulai dari hukum adat pembatasan 7 Kepala Keluarga (KK), ritual Rasulan sebagai bentuk syukur, hingga pengetahuan lokal dalam pelestarian hutan karst dan penjagaan situs sakral. Strategi eksistensi yang diterapkan saat ini adalah dengan mengonversi tradisi-tradisi tersebut menjadi komoditas ekowisata berbasis budaya tanpa harus menghilangkan nilai sakral dari inti ritualnya. Hal ini merupakan bentuk adaptasi cerdas di mana masyarakat melakukan "komodifikasi autentik," yakni menyajikan aspek luar budaya sebagai daya tarik wisata sambil tetap memproteksi makna spiritual terdalam dari intervensi pasar (Cohen, 1988). Strategi ini memungkinkan masyarakat adat Kampung Pitu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari status mereka sebagai bagian dari Global Geopark tanpa harus mengorbankan identitas kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka.

Daya tarik utama Kampung Pitu tidak hanya terletak pada fenomena geografisnya di puncak Gunung Api Purba, tetapi pada konsistensi masyarakatnya dalam mempertahankan pola hidup tradisional yang komunal dan adaptif terhadap lingkungan pegunungan karst. Fenomena ini menciptakan keunikan pengalaman bagi wisatawan ekowisata yang mencari keotentikan di tengah arus modernisasi (Sugiarto, E.; Palupiningsih, 2019). Berhasil atau tidaknya strategi ini sangat bergantung pada kuatnya modal sosial serta kepemimpinan lokal yang mampu menegosiasikan kepentingan pembangunan infrastruktur nasional dengan

kebutuhan konservasi adat. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan memastikan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi alat eksploitasi, melainkan instrumen untuk memperkuat ketahanan budaya (Scheyvens, 2002).

3.2.2. Modal Simbolik

Kondisi eksisting modal simbolik di Kampung Pitu diwujudkan melalui legitimasi kuat sebagai penjaga spiritual Gunung Api Purba serta pengakuan adat formal dari Keraton Yogyakarta, yang kemudian dikonversi menjadi perisai politik melalui status "Masyarakat Adat" untuk menangkal pengusuran ruang atau alih fungsi lahan masif. Strategi ini menunjukkan bahwa identitas budaya bukan sekadar warisan, tetapi instrumen aktif dalam "politik ruang" untuk mempertahankan hak atas tanah adat dari desakan modernitas proyek strategis. Penggunaan klaim masyarakat adat sebagai basis pertahanan ini selaras dengan konsep perlawanan berbasis identitas, di mana komunitas lokal memanfaatkan pengakuan kultural untuk mengamankan kedaulatan teritorial mereka dari intervensi luar (Castells, 2010). Dengan demikian, kapital simbolik yang mereka miliki berfungsi sebagai alat negosiasi yang memaksa otoritas pembangunan untuk mengakui bahwa ruang Geopark bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan ruang hidup yang sarat akan makna sakral dan sejarah yang tidak dapat dikomodifikasi secara sepihak (Lefebvre, 1991).

3.2.3. Modal Sosial

Kondisi eksisting modal sosial di Kampung Pitu ditandai dengan solidaritas internal yang sangat tinggi di antara tujuh keluarga inti serta kuatnya jejaring yang terjalin dengan komunitas pencinta alam. Strategi konversi yang dilakukan masyarakat adalah dengan membangun aliansi strategis bersama akademisi dan organisasi *non-pemerintah* (NGO) lingkungan guna memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi tekanan pengembang PSN. Penguatan jaringan ini mencerminkan pemanfaatan *bridging social capital*, di mana masyarakat lokal menghubungkan diri dengan aktor luar yang memiliki akses terhadap otoritas dan pengetahuan teknis untuk melindungi sumber daya bersama. Pada konteks ini, keberhasilan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidupnya sangat bergantung pada kemampuan mereka mengelola modal sosial menjadi kekuatan kolektif yang mampu melakukan advokasi terhadap kebijakan pembangunan yang bersifat *top-down* (Pramono, 2020). Aliansi lintas sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung wilayah, tetapi juga sebagai instrumen edukasi publik untuk melegitimasi bahwa pelestarian Kampung Pitu merupakan tanggung jawab moral kolektif (Savitri, 2013).

3.2.4. Modal Ekonomi

Kondisi modal ekonomi Kampung Pitu masih didominasi dengan kepemilikan lahan pertanian dan keterbatasan modal finansial modern. Tetapi, masyarakat melakukan strategi konversi melalui pengembangan *homestay* berbasis rumah adat serta penjualan hasil bumi secara langsung kepada wisatawan untuk mencapai ekonoomi yang mandiri. Hal ini merupakan bentuk pemanfaatan potensi lokal dengan mengubah aset budaya dan alam menjadi sumber pendapatan alternatif tanpa harus menghilangkan karakteristik tradisional

yang mereka miliki. Pengembangan ekowisata berbasis komunitas semacam ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang memperkuat kontrol masyarakat lokal atas sumber daya ekonomi mereka di tengah masifnya pembangunan infrastruktur (Sunaryo, 2013). Dengan mengintegrasikan pertanian organik dan jasa pariwisata, masyarakat Kampung Pitu mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang tangguh, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan karst yang menjadi ruang hidup mereka (Astuti, dkk, 2021).

Gambar 2. *Homestay lokal Kampung Pitu*



Sumber: Naredia, 2026

3.3. Ranah (*Field*/Arena) Pariwisata Geopark Pegunungan Sewu: Relasi Kuasa yang Timpang

Ranah adalah sebuah ruang sosial dimana tempa para aktor saling berkontestasi dengan akumulasi habitus dan modal yang dimilikinya untuk mempertahankan posisi dalam ranah tersebut (Mangihut, 2016b). Struktur ranah di Pegunungan Sewu berubah secara drastis dengan masuknya PSN. Ranah yang dulunya dominan dengan aktivitas spiritual-agraria kini bergeser menjadi ranah ekonomi-pariwisata global yang berskala besar. Pada ranah baru ini, Negara melalui pemerintah daerah seringkali menempatkan diri sebagai penyedia ruang bagi modal, di mana regulasi tata ruang digunakan sebagai instrumen hukum formal untuk melegitimasi dominasi kapital ekonomi korporasi di atas hak-hak masyarakat lokal (Fauzi, 2014). Masyarakat Kampung Pitu berada pada posisi pinggiran apabila diukur dari segi instrumen kapital ekonomi. Pertarungan tidak berakhir dengan kekalahan mutlak. Kampung Pitu memindahkan arena pertempuran dari ranah ekonomi ke ranah simbolik-kultural. Pada ranah kultural, posisi tawar Kampung Pitu sangat kuat karena mereka memegang teguh prinsip "orisinalitas" dan "keotentikan" budaya yang ternyata menjadi magnet utama dari komoditas Tanpa eksistensi budaya Kampung Pitu, nilai keunikan Geopark Pegunungan Sewu akan tergradasi di mata internasional (UNESCO).

3.4. Strategi Eksistensi Potensi Lokal

Sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap desakan modernisasi, masyarakat adat menerapkan strategi defensif-ortodoksi yang berfokus pada isolasi doktrinal dan ruang. Strategi ini memandang bahwa eksistensi komunitas sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menjaga batas-batas tradisional dari kontaminasi budaya luar. Strategi defensif-ortodoksi cenderung menutup diri dari arus modernisasi guna menjaga kemurnian doktrin agar tidak terasimilasi oleh nilai-nilai sekuler (Haryanto, 2015:45). Dalam ranah praktis, manifestasi strategi ini terlihat dari penegakan hukum adat yang kaku terhadap batas wilayah pemukiman inti serta pelarangan ketat bagi pihak eksternal untuk mendirikan struktur bangunan modern yang bersifat komersial, seperti hotel atau resor, di area yang dianggap sakral. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk melindungi integritas spasial dan spiritual masyarakat agar tidak tergerus oleh kepentingan kapitalisme global yang sering kali mengabaikan kesucian tanah ulayat.

Guna menjamin keberlanjutan hidup di tengah perubahan zaman, masyarakat adat juga mengadopsi strategi adaptif-heterodoksi melalui pendekatan yang lebih pragmatis dan terbuka. Strategi ini tidak melihat perubahan sebagai ancaman mutlak, melainkan sebagai peluang untuk melakukan negosiasi budaya. Strategi adaptif-heterodoksi memungkinkan adanya sinkretisme atau penyesuaian ajaran sebagai bentuk kompromi kreatif terhadap realitas sosial yang terus berkembang (Prasetyo, 2019:112). Hal ini diwujudkan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan peran aktif generasi muda. Di kawasan Geopark Nglanggeran, misalnya, pemuda adat mentransformasikan pengetahuan lokal menjadi konten digital di media sosial serta berperan sebagai pramuwisata yang mengintegrasikan narasi budaya dan potensi agraris (Wandira & Sudaranti, 2022). Melalui sinergi kedua strategi ini, masyarakat adat tidak lagi sekadar menjadi penonton di tanah sendiri, melainkan bertransformasi menjadi agen pengendali yang berdaulat atas arus pariwisata dan pelestarian identitas di wilayahnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa masyarakat adat Kampung Pitu tidak berada dalam posisi pasif di hadapan deras arus akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Geopark Pegunungan Sewu Gunungkidul. Dengan menggunakan kerangka teori praktik Pierre Bourdieu melalui rumus $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik Sosial}$, penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi habitus, modal, dan posisi dalam ranah secara bersama-sama membentuk dua strategi eksistensi yang dijalankan secara sinergis oleh komunitas ini. Strategi Defensif-Ortodoksi diwujudkan melalui penegakan teguh terhadap aturan adat tujuh kepala keluarga serta pelarangan komersialisasi masif di ruang sakral. Strategi ini berfungsi sebagai benteng perlindungan identitas budaya sekaligus resistensi simbolik terhadap dominasi kapital ekonomi negara dan investor. Selain itu Strategi Adaptif-Heterodoksi dijalankan melalui adopsi selektif terhadap pariwisata berbasis masyarakat, pengelolaan media sosial oleh pemuda adat, serta konversi potensi lokal menjadi komoditas ekowisata tanpa mengorbankan kesakralan inti adat. Kedua strategi ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer.

Masyarakat Kampung Pitu memindahkan arena pertarungan dari ranah ekonomi, di mana posisi mereka lemah ke ranah simbolik-kultural, tempat mereka memegang otoritas penuh sebagai penjaga orisinalitas dan keotentikan budaya. Pada ranah inilah, eksistensi Kampung Pitu justru menjadi aset tak tergantikan bagi nilai keunikan Geopark Pegunungan Sewu di mata UNESCO dan komunitas internasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian potensi lokal berbasis adat di Kampung Pitu bukan sekadar bentuk resistensi, melainkan sebuah strategi eksistensi yang adaptif, reflektif, dan berdaya dalam menghadapi dilema modernisasi yang dibawa oleh PSN. Temuan ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi pemangku kebijakan bahwa keberlanjutan pembangunan kawasan *Geopark* bertumpu pada, bukan berlawanan dengan, keberadaan komunitas adat yang menjadi rohnya.

REFERENSI

- Abdullah, P. M. (2015). Penelitian Metodologi Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Astuti, Maria T.; Putro, Tandiyo S.; Purwaningsih, A. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dan Ekowisata*. Deepublish.
- Beta Desi Pratiwi; V. Indah Sri Pinasti. (2016). Tourism and Culture (Study The Role of Local Communities in Tourism Management in Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul). *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(6), 1–15.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Wiley-Blackwell.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386.
- Fauzi, N. (2014). *Tanah dalam Penataan Ruang*. Bhumi Bhakti Press.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *Habitus x Modal + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Jalasutra.
- Haryanto, S. (2015). *Sosiologi Agama: Dari Klasik hingga Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (1st ed.). Kanisius.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Blackwell Publishing.
- Mangihut, S. (2016a). Teori “Gado-Gado” Pierre-Felix Bourdieu. *Jurnal Studi Kultural*, 1(2), 79–82.
- Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (2011).
- Perda Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (2019).

- Perpres RI No 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (2020).
- Pramono, A. (2020). *Modal Sosial dan Advokasi Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria*. Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, A. B. (2019). *Dinamika Kelompok Keagamaan di Indonesia: Strategi dan Eksistensi*. Pustaka Pelajar.
- Purwana, B. H. S., Larasati, T. A., & Adrianto, A. (2019). *Komunitas Kampung Pitu Gunung Kidul* (1st ed.). Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2019). *Teori Sosiologi Modern*. Pustaka Pelajar.
- Savitri, L. A. (2013). *Rezim Agraria dan Gerakan Perlawanan Kebudayaan*. Tanah Air Beta.
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.
- Sekarsih, F. (2021). Kematian yang Ditolak di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul: Studi Etnografi tentang Tradisi Lokal dan Kelestarian Sumberdaya Alam. *Demos: Journal of Demography, Ethnography and Social Studies*, 3(1).
- Sugiarto, E.; Palupiningsih, A. (2019). Identifikasi kearifan lokal sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitaliti Dan Perjalanan*, 3(1), 35–43.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Supriadi, Purwanto, M. R., Mukharrom, T., & Rahmah, P. J. (2021). A Study on Nglanggeran Kampung Pitu: Sociologically and Anthropologically Perspectives. *IDEAS, Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(2021), 45–50. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.392>
- Wandira, R. A., & Sudaranti, S. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Pemuda Adat dalam Mengembangkan Potensi Wisata Kampung Pitu. *Jurnal Pariwisata Budaya*, 7(2), 145–156.